

**ARTIKEL**

**KONSEP DWIFUNGSI ABRI DAN PERANNYA DIMASA  
PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1965-1998**



**Oleh :**

**Kornelis Rikan**

**NPM. 10144400106**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

**KORNELIS RIKAN.** Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Oktober. 2014.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang berdirinya ABRI dan lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI serta peran ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru.

Dalam membahas skripsi ini digunakan metode sejarah dengan tahapan yaitu, pemilihan judul, heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi.

Dalam penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Konsep Dwifungsi ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi kekuatan sosial politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di segala aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI adalah sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI , untuk bersama-sama dengan kekuatan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik sejak 1965 dapat dilihat dalam empat bidang utama, yakni sebagai stabilisator, sebagai dinamisator, sebagai pelopor, dan sebagai pelaksana sistem demokrasi liberal. Dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi, dengan dalih “militer” professional, dimana militer diletakan sebagai sesuatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. ABRI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR.

Kata Kunci: Dwifungsi ABRI, Orde Baru

## **ABSTRACT**

This research aims to determine the background of the establishment of the Armed Forces and the Armed Forces as well as the birth of the concept of dual function of ABRI's role in The Reign of the New Order.

In discussing this paper used the method with stages history, the selection of titles, heuristics, source criticism, interpretation, historiography.

In this thesis it can be concluded that, ABRI's dual function concept assume two functions, namely as a function of the strength of top security and political social strength function, which plays an important role in achieving national stability in all steady and dynamic aspects of national life in order to realize the established Tannas national goals based on Pancasila. Birth of ABRI's dual function concept is as soul, determination and spirit of devotion Armed Forces, together with the other powers, duties and responsibilities bear the struggle of Indonesia, both in the field of defense and security in the field of the welfare state and the nation in order to create a national destination, based on Pancasila and 1945 Constitution under the leadership of President Suharto's role as a social and political force armed forces from 1965 can be seen in four main areas, namely as a stabilizer, as a dynamic factor, as a pioneer, and as the executor of a liberal democratic system. In the military's role in the New Order that result in changes in democracy, under the pretext of "military" professional, which placed the military as something significant to change the future of the nation state, namely the need for modernization at the same responsibilities towards society and the attitude of devotion to the country. Armed Forces took part determine the policies of the state and thus should be formally recognized and positioned as a social and political force. Indonesian military then occupy political positions such as ministers, governors, regents, members of Golkar and sit in the House of Representatives.

**Keywords:** The Dual function of ABRI, New Order

## **Konsep Dwifungsi ABRI Dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru**

**Tahun 1965-1998**

### **A. Latar Belakang**

Konsep Dwifungsi ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi kekuatan sosial politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di segala aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI adalah sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI , untuk bersama-sama dengan kekuatan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya ABRI ?
2. Bagaimana konsep Dwifungsi ABRI?
3. Bagaimana peran Dwifungsi ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru?

### **C. Metode Penulisan**

Metode penelitian sejarah, lazim juga disebut dengan metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Menurut G. J. Garraghan (1957:33) dalam buku Dudung Abdurahman (2007:53) metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Hal senada juga dikemukakan oleh Louis Gottschalk (1983:32) dalam bukunya Dudung Abdurahman (2007:54) yang menjelaskan bahwa dalam metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi sejarah yang dapat dipercaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi literatur yang meliputi pengidentifikasian, penjelasan, penguraian secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

#### **1. Pemilihan Judul**

Topik penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui suatu penelitian. Menurut Kuntowijoyo (1996:90), topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam hal ini harus kembali kepada motif penelitian yakni bukan semata-mata

untuk menghasilkan karya yang bersifat komplikasi. Akan tetapi, haruslah dapat memberikan sumbangan baru kepada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan fakta baru dari penemuan-penemuan dalam melaksanakan penelitian atau interpretasi baru terhadap data yang telah didapat (Alfian, 1994:2).

## 2. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “ *Heurishein* “ yang artinya memperoleh (Dudung Abdurahman, 2007:63) sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain dari buku-buku perpustakaan, artikel, internet dan lain-lain.

## 3. Kritik Sumber

Setelah semua data dalam berbagai kategori terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan uji :

- a. Keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dengan langkah menguji sumber-sumber itu merupakan jejak sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Keabsahan tentang kesahihan sumber yang dilakukan melalui kritik intern dengan langkah melihat kebenaran informasi dari penulis dan kemampuannya dalam menyatakan sesuatu dengan tepat berdasarkan pada sumber-sumber autentik lainnya.

#### 4. Interpretasi

Interpretasi sering juga disebut dengan analisis data, menurut Kuntowijoyo (1995:100) dalam buku Dudung Abdurahman (2007:73) ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu : analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatukan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya dan disintetiskan agar memperoleh hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

#### 5. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dari awal hingga akhir (Dudung Abdurahman, 2007:76). Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu historiografi atau sering disebut dengan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berupa skripsi sejarah.

Dalam penyusunan ini terdiri dari tiga bagian yaitu : pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Setiap bagian dijabarkan dalam bab atau sub bab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat. Namun, diantara masing-masingnya terdapat benang merah yang saling berhubungan.

#### **D. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan judul skripsi yaitu “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998” mempunyai tujuan antara lain:

##### 1. Tujuan Umum

- a. Melalui penelitian skripsi ini maka peneliti dapat memperaktekan hasil belajar selama masa kuliah terutama pada mata kuliah historiografi Sejarah Indonesia dan Umum serta mata kuliah Metodologi Sejarah, sehingga dapat menambah wawasan luas serta memperdalam pemahaman.
- b. Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti dapat melatih diri untuk berfikir secara kritis, rasional dan obyektif terhadap peristiwa-peristiwa sejarah khususnya Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya ABRI.
- b. Untuk mengetahui latar belakang Konsep Dwifungsi ABRI.
- c. Untuk mengetahui peran ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru.

#### **E. Manfaat Penulisan**

Adapun kegunaan kajian skripsi dari judul “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru 1965-1998 “ adalah :



## 1. Bagi Pembaca

- a. Diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang luas tentang latar belakang berdirinya ABRI.
- b. Diharapkan pembaca dapat mengetahui lahirnya Gerakan Konsep Dwifungsi ABRI.
- c. Diharapkan pembaca dapat mengetahui dengan jelas peran ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru.

## 2. Bagi Penulis

- a. Sebagai alat untuk mengukur kemampuan penulis dalam meneliti dan merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan sejauh mungkin mencari kebenaran sejarah dalam bentuk tulisan.
- b. Merupakan cermin kesadaran bagi penulis untuk meningkatkan mutu karya sejarah serta memperluas baik dari segi wawasan, penguasaan teknik penulisan maupun dari segi ilmiah.

## **LATAR BELAKANG BERDIRINYA ABRI**

### **A. Sejarah Berdirinya ABRI**

Sejarah berdirinya ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Selain bersifat lokal, umumnya keberadaan laskar kurang terorganisir. Awal berdirinya tentara Indonesia adalah Badan Penolong Korban Perang yang didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945. Badan tersebut mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam undang-undang pembentukannya, disebut bahwa salah satu fungsi BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan

negara lain yang bersangkutan. Dalam hierarki pemerintah, BKR ditempatkan dibawah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sedangkan BKR yang ada di daerah secara paralel juga berada dibawah Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Lalu pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Hari kelahiran TKR kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi Hari TNI dan diperingati setiap tahun. Kemudian Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tertara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada 24 Januari 1946. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 TRI dan berbagai kelompok laskar rakyat digabung menjadi TNI.

## **B. Perkembangan ABRI di Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

## **KONSEP DWIFUNGSI ABRI**

### **A. Latar Belakang Konsep Dwifungsi ABRI**

Konsep Dwifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur

dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Nasution menganggap, bahwa ”TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.

## **B. Dampak Pelaksanaan Konsep Dwifungsi ABRI**

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki dampak yang akan dirasakan secara luas, tidak terkecuali Dwifungsi ABRI. Dalam hal ini, kita akan mengetahui bahwa Dwifungsi ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini, namun juga dampak positif bagi sistem politik di Indonesia yang seringkali tidak diekspos pada masyarakat. Diantara berbagai dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan Dwifungsi ABRI, berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: (a). Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”, (b). Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu, (c). ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.

## **PERAN DWIFUNGSI ABRI**

### **A. Peran ABRI Dalam Pertahanan dan Keamanan di Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, pertahanan keamanan negara fokus kepada penumpasan G 30 S/PKI. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan

masalah ini adalah operasi militer tempur, operasi militer intelejen dan operasi militer teritorial, yang semuanya terkandung dalam Doktrin Tri Ubaya Çakti. Doktrin ini kemudian dikonsolidasikan lagi menjadi Doktrin Sad Daya Dwi Bakti pada tahun 1994 yang fokus pada dimensi operasi TNI-ABRI, keamanan pulau nusantara, keamanan laut, keamanan udara, keamamanan masyarakat dan pemeliharaan perdamaian dunia.

## **B. Peran ABRI Dalam Sosial Politik di Masa Orde Baru**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Pertama, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Rasa nasionalismenya lebih kuat. Sayangnya, tidak selamanya *monopoly offorces* militer dijabarkan secara tetap di lapangan karena sering disalahgunakan atau disalahtafsirkan anggotanya. Kedua, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator negara yang diartikan jika militer mengambil alih kekuasaan politik, maka selalu disertai pernyataan pengambilalihan itu hanya bersifat sementara sampai stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Keempat, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum.

## **KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan Historis**

Latar belakang Konsep Dwifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Nasution menganggap, bahwa”TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang

kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.

Dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi, dengan dalih “militer” professional, dimana militer diletakan sebagai sesuatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdianya kepada masyarakat dan negara. TNI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR.

## **B. Kesimpulan Pedagogis**

Dengan Konsep Dwifungsi ABRI yang terbuka, pandangan yang jauh kedepan demi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat diambil manfaatnya dalam pembelajaran didunia pendidikan kita saat ini. Pembelajaran yang diambil adalah bagaimana kemauan untuk melakukan sesuatu atas nama kemanusiaan, bangsa dan negara. Sifat kesatria yang selalu ditunjukkan dalam setiap sikap dan tindakan, mempunyai komitmen yang tinggi dan keberanian dalam mengambil resiko menjadi dasar penting bagi setiap generasi dalam upaya memajukan bangsa ini dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala macam bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu, tentunya mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Dari peran ABRI di Orde Baru ini adalah sebuah refleksi positif bagi kita semua untuk memahami sejauh mana pentingnya nilai keadilan dan persamaan harkat dan martabat bagi seluruh manusia maupun bangsa, dimana hal ini akan mempengaruhi gerak langkah perjalanan sebuah masyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan bersama. Semoga sejarah kelam ABRI, tidak terulang lagi diwaktu-waktu yang akan datang, karena kita mampu

membentengi diri kita masing-masing dengan pemahaman dan pengalaman dimasa lalu.

Dari pembahasan tentang Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Orde Baru, semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Khususnya bagi seorang calon pendidik harus mampu menangkap apa saja peristiwa yang terjadi dan menganalisa secara baik dari aspek positif maupun negatifnya, agar pemahaman yang baik dapat ditanamkan pada peserta didik, dan begitu pula sebaliknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. (2007) *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup.
- Jenkins, David. 2010. *Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kasenda, Peter. 2013. *Soeharto Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kuntowijoyo, (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Maarif, Samsul. 2011. *Militer Dalam Parlemen Tahun 1960-2004*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Matanasi, Petrik. 2011. *Sejarah Tentara Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.
- Mahpudi, dkk. 2012. *Pak Harto The Untold Stories*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Panuju, Redi 2009. *Oposisi Demokrasi Dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka.
- Saelan, H. Maulwi, 2001, *Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 46*, Jakarta: Trans Media Pustaka.

- Samego, I, et al. 1998. *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan.
- Sari, Dewi Ambar. 2007. *Pak Harto Habis Manis Sepah Dibuang Percik Pengkhianatan Dan Hujatan*. Jakarta: Jakarta Citra.
- Simatupang, Mayjen TB. 1981. *Geopolitik dan Masalah Pertahanan Kita dalam Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai*. Jakarta : Sinar Harapan
- Subroto, Hendro. 2009. *Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tianlean, Bakri A.G. 2010. *Jenderal Besar HM. Soeharto Mengukir Dua Momentum Penting Bagi Keselamatan Bangsa & Negara*. Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa.
- Wanandi, Jusuf. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

### **BIODATA PENULIS**

Nama: Kornelis Rikan

NPM : 10144400106

Alamat: (Jl. Ikip PGRI, Sonosewu, Bantul, DIY)

(Lewoleba Timur, Nubatukan, Lembata, NTT)

Riwayat Pendidikan : - SDK Hobamatan  
- SMP PGRI LEWOLEBA  
- SMA PGRI LEWOLEBA  
- Universitas PGRI Yogyakarta